

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PADA PENGAWASAN JEMBATAN TIMBANG SUNGAI LANSEK PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH

Implementation of Law Number 22 of 2009 in the Supervision of the
Sungai Lansek Weighbridge from the Perspective of Siyasa Tanfiziyah

Nila Maharani & Ali Rahman

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
nilamaharani5@gmail.com; ali.rahman26des@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Jun 12, 2026	Jul 10, 2026	Jul 22, 2026	Jul 27, 2026

Abstract

Although weighbridge supervision is an important instrument for enforcing Law Number 22 of 2009 to ensure traffic safety and protect road infrastructure, its implementation at the Sungai Lansek Motor Vehicle Weighing Implementation Unit (UPPKB) continues to face various constraints, resulting in suboptimal supervisory effectiveness. This study aimed to analyze the implementation of Law Number 22 of 2009 in the supervision of the Sungai Lansek Weighbridge and examine it from the perspective of *Siyasa Tanfiziyah*. The study employed a qualitative approach with a case study design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving UPPKB officers, truck drivers, and community members. The data were then analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results showed that supervision had been conducted through document inspection, examination of the physical condition and dimensions of vehicles, vehicle weighing, and enforcement in accordance with standard operating procedures. However, the effectiveness of supervision remained constrained by limited human resources, budgets,

and supporting facilities, suboptimal interagency coordination, and low driver compliance, as drivers avoided weighing because they carried excessive loads and considered economic factors. From the perspective of *Siyasah Tanfiziyyah*, the implementation of supervision had essentially reflected the principles of justice, trustworthiness, and public welfare, although its implementation was not yet fully optimal. This study contributes to the development of *Siyasah Tanfiziyyah* studies in transportation policy implementation and provides practical implications regarding the need to strengthen resources, improve interagency coordination, and optimize the supervision system to enhance driver compliance, traffic safety, and the protection of road infrastructure.

Keywords: Policy Implementation; Law Number 22 of 2009; Weighbridge; *Siyasah Tanfiziyyah*; Transportation Supervision

Abstrak: Meskipun pengawasan jembatan timbang merupakan instrumen penting dalam menegakkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan melindungi infrastruktur jalan, implementasinya di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Sungai Lansek masih menghadapi berbagai kendala sehingga efektivitas pengawasan belum optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam pengawasan Jembatan Timbang Sungai Lansek serta meninjaunya dari perspektif *Siyasah Tanfiziyyah*. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang melibatkan petugas UPPKB, pengemudi truk, dan masyarakat. Data kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan telah dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan dimensi kendaraan, penimbangan kendaraan, serta penindakan sesuai dengan prosedur operasional standar. Namun, efektivitas pengawasan masih terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendukung, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta rendahnya kepatuhan pengemudi yang menghindari penimbangan karena membawa muatan berlebih dan mempertimbangkan faktor ekonomi. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfiziyyah*, pelaksanaan pengawasan pada dasarnya telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan, meskipun implementasinya belum sepenuhnya optimal. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian *Siyasah Tanfiziyyah* dalam implementasi kebijakan transportasi serta memberikan implikasi praktis mengenai perlunya penguatan sumber daya, peningkatan koordinasi antarinstansi, dan optimalisasi sistem pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan pengemudi, keselamatan lalu lintas, serta perlindungan infrastruktur jalan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Jembatan Timbang; *Siyasah Tanfiziyyah*; Pengawasan Transportasi

PENDAHULUAN

Transportasi jalan memiliki peran yang penting dalam menunjang mobilitas nasional (Yunus, 2021). Keberadaan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang tertib, aman, dan efisien merupakan prasyarat penting bagi kelancaran aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Peningkatan mobilitas masyarakat dan volume distribusi logistik menuntut adanya regulasi

serta manajemen lalu lintas yang mampu mengakomodasi dinamika kebutuhan transportasi modern (Hanafiah et al., 2026; Zhang et al., 2025). Ketidakteraturan dalam pengawasan penyelenggaraan angkutan jalan dapat menyebabkan berbagai permasalahan, seperti kemacetan, kecelakaan, hingga kerusakan infrastruktur yang berakibat pada tingginya biaya sosial dan ekonomi dalam konteks pembangunan nasional, lalu lintas dan angkutan jalan menjadi salah satu pilar utama yang mempengaruhi efektivitas konektivitas antar-daerah, efisiensi rantai pasok serta stabilitas harga komoditas di pasar (Ricana, 2024; Rahmawati & Maruman, 2024; Hasanli & Safarova, 2026). Lancarnya distribusi barang melalui transportasi darat, terutama angkutan barang, memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan daya saing ekonomi dan penguatan integrasi nasional. oleh karena itu, pemerintah berkewajiban menetapkan kebijakan dan regulasi yang komprehensif guna memastikan bahwa penyelenggaraan transportasi darat berlangsung (Ayunia et al., 2020; Lesmini et al., 2025).

Jembatan Timbang Sungai Lansek, sijunjung merupakan salah satu fasilitas strategis yang berfungsi untuk mengendalikan dan memastikan kepatuhan kendaraan angkutan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan Jalan, menjaga keselamatan dan infrastruktur jalan raya. Walaupun sudah ada peraturan yang mengatur, namun pada saat ini penanganan muatan berlebih pada angkutan barang masih belum terwujud dengan baik, Sebagaimana data awal di sekitar UPPKB Sungai Lansek menunjukkan munculnya perilaku sopir yang menghindari proses penimbangan dengan cara berhenti atau parkir di ruas jalan sebelum lokasi jembatan timbang. Praktik ini biasa dilakukan oleh sopir yang melanggar kendaraan yang mati kir atau membawa muatan melebihi ketentuan Over Dimension Dan Over Loading.

Alasan dari pengemudi truk angkutan tersebut salah satu faktornya karena masalah ekonomi, dia sadar melanggar hingga membuat mereka harus terpaksa berhenti agar tidak kena sanksi atau tilang oleh petugas UPPKB untuk berhenti dan juga karena waktu, jika kalau di teruskan memakan waktu untuk sanksi pelanggaran yang harus di jalankan. ketakutan akan sanksi itu membuat mereka berhenti di badan jalan atau bahu jalan sampai dinas perhubungan perhubungan siap melakukan giat dari jam yang telah di tetapkan sampai mereka bisa melewati jembatan timbang UPPKB.

Pada saat dilakukan wawancara awal dengan dinas perhubungan di UPPKB sungai lansek, petugas mengatakan banyak yang menghindari timbangan karena kelebihan muatan

dan mati kir, dan tidak ada pemuda yang masuk secara sukarela dalam timbangan dan memilih berhenti di ruas jalan. Sehingga mengakibatkan menjadi hambatan aliran lalu lintas dan menciptakan kondisi bahaya, terutama pada ruas jalan sempit atau minim penerangan jika pada malam hari, yang pada akhirnya meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lain dan membuat keresahan dan ketakutan bagi masyarakat terutama pejalan kaki yang ingin menyeberang. maka dari itu UPPKB Sungai Lansek menjadi tidak efektif dalam pengawasan jembatan timbang, maka Penelitian ini penting untuk diteliti karena fungsi dari UPPKB tidak optimal dalam menjalankan fungsinya dalam penurunan umur layanan jalan, peningkatan biaya perawatan infrastruktur, serta tingginya risiko kecelakaan lalu lintas (Rahmawati & Maruman, 2024).

Perspektif siyasah tanfidziyah terhadap undang-undang nomor 22 tahun 2009, dan melihat sejauh mana kebijakan tersebut mewujudkan nilai keadilan, ketertiban, dan kemaslahatan umum sesuai ajaran Islam (Aprelia et al., 2023; Akmal et al., 2025; Iswantini, 2025). Penelitian ini berupaya mengungkap implementasi kebijakan di lapangan beserta hambatannya, sehingga dapat memberikan kontribusi teoretis maupun praktis. Berdasarkan fenomena-fenomena yang penulis paparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai hal ini, dalam sebuah kajian penelitian berupa skripsi dengan judul “Implementasi undang-undang nomor 22 tahun 2009 pada pengawasan jembatan timbang sungai lansek perspektif siyasah tanfidziyah”.

Berdasarkan rumusan masalah dan fenomena yang ditemukan di lapangan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam pengawasan Jembatan Timbang Sungai Lansek, mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaannya, serta mengkaji kesesuaian pelaksanaan pengawasan tersebut dengan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyah, khususnya nilai keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*al-maslahah*). Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pelaksanaan pengawasan jembatan timbang sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas penegakan hukum dan tata kelola transportasi yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif dan desain studi kasus. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam

implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam pengawasan Jembatan Timbang Sungai Lansek serta menilai kesesuaiannya dengan perspektif *Siyasah Tanfiziyah*. Penelitian dilaksanakan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Jembatan Timbang Sungai Lansek, Kabupaten Sijunjung, dengan proses pengumpulan data lapangan berlangsung pada April 2026, didahului observasi awal pada Desember 2025.

Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu informan yang dianggap mengetahui secara langsung pelaksanaan pengawasan di UPPKB Sungai Lansek. Informan terdiri atas pengawas UPPKB, masyarakat sekitar, dan pengemudi truk yang berkaitan dengan aktivitas jembatan timbang.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati secara langsung pelaksanaan pengawasan di UPPKB, wawancara dilakukan kepada para informan guna memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan beserta hambatan yang dihadapi, sedangkan dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui peraturan perundang-undangan, dokumen pendukung, dan arsip yang relevan (Islammudin & Mardijono, 2023; Pantar, 2025)

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Ahmad & Muslimah, 2021; Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Seluruh data yang diperoleh diinterpretasikan secara sistematis untuk menggambarkan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pengawasan Jembatan Timbang Sungai Lansek serta dianalisis berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfiziyah*

HASIL

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan di UPPKB Sungai Lansek telah dilaksanakan melalui beberapa tahap, yaitu pemeriksaan awal kendaraan, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan dimensi kendaraan, penimbangan, serta tindakan terhadap pelanggaran. Petugas juga melakukan pengawasan rutin dengan jadwal operasional tertentu, bahkan ada petugas yang berjaga pada malam hari agar pengawasan tetap berjalan.

Selain penimbangan, petugas juga melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan berkoordinasi dengan aparat kepolisian dalam penegakan hukum. Dalam pelaksanaannya, petugas mengupayakan agar kendaraan yang melintas tetap berada dalam batas aturan, sehingga tujuan menjaga keselamatan dan keawetan jalan dapat tercapai. Upaya

ini menunjukkan bahwa secara administratif UPPKB telah menjalankan fungsi dasarnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun demikian, efektivitas pengawasan belum sepenuhnya optimal. Salah satu alasan utamanya adalah adanya pengemudi yang sengaja berhenti di bahu jalan atau menghindari timbangan karena kendaraan membawa muatan lebih atau dokumen kendaraan tidak lengkap. Praktik ini bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga berbahaya bagi pengguna jalan lain.

Penelitian ini juga menemukan beberapa hambatan utama dalam pengawasan jembatan timbang Sungai Lansek. Pertama, keterbatasan sumber daya manusia menjadi kendala yang cukup serius, terutama karena tidak adanya tenaga penyidik dan penguji yang memadai. Kedua, anggaran yang terbatas, terutama akibat kebijakan efisiensi, menyebabkan petugas tidak dapat menjalankan penindakan secara optimal.

Ketiga koordinasi antarinstansi belum berjalan intensif. Dalam wawancara disebutkan bahwa kerja sama dengan kepolisian hanya dilakukan sesekali, bahkan ada kondisi gabungan operasi yang sangat jarang karena keterbatasan anggaran dan jadwal. Keempat, rendahnya kesadaran pengemudi juga menjadi masalah utama. Banyak pengemudi mengetahui bahwa tindakan mereka melanggar hukum, tetapi tetap melakukannya karena alasan ekonomi dan tuntutan pekerjaan.

Jika dianalisis dengan siyasah tanfiziyah, pengawasan jembatan timbang Sungai Lansek pada dasarnya sudah mencerminkan tujuan syariat, yaitu menjaga keselamatan, menegakkan aturan, dan mencegah kerusakan. Prinsip keadilan terlihat dari upaya petugas yang menindak pelanggaran sesuai prosedur, tanpa membedakan pelaku. Ini sejalan dengan perintah Al-Qur'an untuk berlaku adil dalam menetapkan hukum. Prinsip amanah juga tampak dalam tanggung jawab petugas UPPKB untuk menjalankan tugas pengawasan secara terbuka dan sesuai aturan. Namun, amanah ini belum sepenuhnya terlaksana secara maksimal karena keterbatasan sistem dan sumber daya. Dalam konteks siyasah tanfiziyah, pemerintah dituntut tidak hanya membuat kebijakan, tetapi juga memastikan kebijakan itu benar-benar bermanfaat dan dapat dijalankan secara efektif.

Sementara itu, prinsip kemaslahatan menjadi dasar terpenting dari pengawasan jembatan timbang. Tujuan utama kebijakan ini adalah melindungi masyarakat dari kecelakaan, menjaga kualitas jalan, dan menciptakan ketertiban umum. Maka meskipun pelaksanaannya

masih menghadapi banyak hambatan, arah kebijakan tersebut tetap berada dalam koridor nilai-nilai Islam yang menekankan manfaat bagi masyarakat luas.

PEMBAHASAN

Implementasi Undang- Undang No 22 Tahun 2009

Pengawasan jembatan timbang di Sungai Lansek merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan negara dalam menjaga ketertiban lalu lintas dan melindungi infrastruktur jalan dari kerusakan akibat kendaraan bermuatan berlebih. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengawasan muatan angkutan barang ditegaskan melalui ketentuan mengenai daya angkut, dimensi kendaraan, dan penggunaan alat penimbangan (Aqiilah, 2024) Dengan dasar hukum tersebut, jembatan timbang bukan hanya alat teknis, tetapi juga instrumen hukum yang berfungsi memastikan setiap kendaraan barang mematuhi batas muatan yang telah ditetapkan.

Dalam praktik di lapangan, petugas UPPKB Sungai Lansek melakukan serangkaian pemeriksaan yang dimulai dari kendaraan memasuki area pengawasan, pengecekan dokumen, penimbangan, sampai pencatatan hasil pemeriksaan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa secara formal pengawasan telah memiliki pola kerja yang jelas dan terstruktur. Namun, keberhasilan implementasi tidak dapat diukur hanya dari adanya prosedur, karena prosedur yang baik belum tentu menghasilkan hasil yang optimal jika dukungan sumber daya dan kepatuhan masyarakat masih rendah.

Pengawasan yang efektif menuntut kesesuaian antara aturan dan perilaku para pengguna jalan. Ketika pengemudi memilih berhenti di bahu jalan untuk menghindari timbangan, maka hal ini memperlihatkan adanya resistensi terhadap kebijakan. Resistensi ini muncul karena pengemudi menilai bahwa pemeriksaan di jembatan timbang berpotensi menimbulkan sanksi, padahal muatan yang dibawa sudah melebihi ketentuan. Perilaku tersebut pada akhirnya mengurangi efektivitas kebijakan dan menimbulkan dampak negatif bagi ketertiban lalu lintas.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak cukup hanya dengan menyusun aturan, tetapi juga memerlukan pengawasan berlapis, koordinasi antarinstansi, dan penegakan sanksi yang konsisten. Jika tidak, kebijakan hanya menjadi teks normatif yang tidak sepenuhnya bekerja di lapangan. Dalam kasus Sungai Lansek, ketidakefektifan pengawasan terlihat dari masih adanya kendaraan yang berhenti sebelum

area penimbangan, yang menandakan bahwa fungsi pengendalian belum berjalan sepenuhnya.

Salah satu persoalan utama dalam penelitian ini adalah perilaku pengemudi yang sengaja menghindari jembatan timbang. Dari hasil wawancara yang dijelaskan dalam skripsi, alasan yang sering muncul adalah muatan berlebih, mati kir, serta kekhawatiran terkena sanksi. Pengemudi memilih menunggu di pinggir jalan hingga petugas tidak lagi melakukan pengawasan aktif. Pola ini menunjukkan adanya perhitungan ekonomi di pihak pengemudi yang lebih mengutamakan kelancaran pengiriman barang daripada kepatuhan terhadap aturan.

Secara sosiologis, perilaku tersebut dapat dipahami sebagai bentuk kompromi terhadap tekanan ekonomi. Pengemudi merasa harus tetap menjalankan pekerjaan meskipun sadar bahwa muatan yang dibawa telah melanggar aturan. Dalam banyak kasus, mereka tidak menolak aturan secara terbuka, tetapi mencari cara untuk menghindari konsekuensi hukum. Situasi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pengawasan muatan belum sepenuhnya menyentuh dimensi sosial-ekonomi yang dihadapi para pelaku angkutan barang.

Dampak dari tindakan menghindari timbangan tidak hanya dirasakan oleh petugas, tetapi juga masyarakat umum. Truk yang berhenti di badan jalan dapat menutup pandangan, mempersempit ruang gerak kendaraan lain, serta meningkatkan potensi kecelakaan. Dalam konteks jalan lintas yang ramai, kondisi ini sangat berbahaya bagi pejalan kaki, pengendara sepeda motor, dan kendaraan kecil yang melintas. Karena itu, pengawasan jembatan timbang memiliki dimensi keselamatan publik yang sangat penting, bukan hanya soal kepatuhan administratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pengawasan jembatan timbang Sungai Lansek terdiri dari keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, dan rendahnya kepatuhan pengemudi. Ketiga faktor ini saling berkaitan dan memperlemah efektivitas kebijakan. Keterbatasan SDM menyebabkan tidak semua tahapan pengawasan dapat dijalankan secara maksimal, terutama ketika petugas penguji dan penyidik tidak tersedia secara memadai.

Dari sisi anggaran, petugas menyampaikan bahwa penindakan berupa tilang tidak dapat dilakukan karena efisiensi dan keterbatasan biaya operasional. Akibatnya, bentuk pengawasan lebih banyak diarahkan pada teguran dan sosialisasi. Walaupun pendekatan edukatif penting, namun tanpa dukungan sanksi yang tegas, efek jera menjadi lemah. Hal ini

menyebabkan sebagian pengemudi tetap mengulangi pelanggaran karena merasa konsekuensi hukum tidak terlalu berat.

Hambatan lain muncul dari komunikasi dan koordinasi antarinstansi. Pengawasan lalu lintas seharusnya melibatkan sinergi antara dinas perhubungan, kepolisian, dan perangkat pengawasan lain. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan gabungan hanya dilakukan sesekali, bahkan frekuensinya sangat terbatas. Koordinasi yang tidak intensif ini membuat pengawasan menjadi kurang kuat, terutama dalam menghadapi kendaraan yang sengaja menghindari pemeriksaan.

Jika dianalisis menggunakan teori George C. Edwards III, implementasi pengawasan jembatan timbang di Sungai Lansek memperlihatkan kondisi yang belum optimal pada keempat variabel utama. Pertama, komunikasi kebijakan telah berjalan, tetapi belum sepenuhnya efektif karena koordinasi antarinstansi masih terbatas. Kedua, sumber daya yang tersedia belum mencukupi, baik dari segi personel, fasilitas, maupun anggaran. Ketiga, disposisi pelaksana menunjukkan adanya komitmen, tetapi kewenangan yang terbatas mengurangi daya tindak mereka. Keempat, struktur birokrasi sudah ada, tetapi belum cukup kuat untuk mendukung penegakan secara menyeluruh.

Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfiziyah Terhadap Upaya-Upaya Pengawasan Jembatan Timbang

Dalam perspektif siyasah tanfiziyah, pengawasan jembatan timbang merupakan bagian dari tugas pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan umum (Heri, 2024). Kebijakan yang bertujuan menjaga keselamatan pengguna jalan, melindungi infrastruktur, dan menertibkan angkutan barang sejalan dengan prinsip al-maslahah. Negara dalam pandangan Islam tidak hanya bertugas membuat aturan, tetapi juga memastikan bahwa aturan itu dijalankan secara efektif dan adil. Karena itu, pengawasan UPPKB dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kekuasaan yang berorientasi pada kepentingan public (Rozalia et al., 2026; Sulistiyawati et al., 2025; Nawar& Khalid, 2025).

Prinsip al-'adl terlihat dari upaya petugas menerapkan SOP terhadap semua pelanggar tanpa membedakan status pengemudi atau kepemilikan kendaraan. Dalam teori siyasah tanfiziyah, keadilan berarti memberi perlakuan yang proporsional kepada setiap pihak sesuai pelanggaran yang dilakukan. Jika ada kendaraan yang melanggar batas muatan, maka tindakannya harus dihadapkan pada aturan yang sama. Dengan demikian, pengawasan

jembatan timbang pada dasarnya telah mengandung nilai keadilan, walaupun penerapannya belum maksimal karena keterbatasan teknis.

Prinsip amanah juga tampak dalam tanggung jawab pemerintah untuk menjaga keselamatan masyarakat. Al-Qur'an menegaskan pentingnya menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum secara adil. Dalam konteks ini, petugas UPPKB memikul amanah publik untuk mencegah kerusakan jalan dan bahaya lalu lintas. Ketika pengawasan belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, hal itu menunjukkan bahwa amanah belum sepenuhnya terwujud secara sempurna, meskipun arah kebijakannya tetap benar (Muzaki et al., 2024)

Selain itu, tindakan pengawasan juga berkaitan dengan prinsip taat terhadap kemaslahatan dan pencegahan mudarat. Kendaraan yang berhenti di bahu jalan untuk menghindari timbangan justru menimbulkan risiko lebih besar bagi masyarakat, seperti kecelakaan, kemacetan, dan gangguan aktivitas warga. Dari sudut siyasah tanfiziyah, pemerintah wajib mengambil langkah yang lebih kuat agar kemudatan publik dapat diminimalkan. Karena itu, penguatan koordinasi, peningkatan sanksi, dan perbaikan fasilitas menjadi kebutuhan mendesak.

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam pengawasan jembatan timbang tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, kecukupan anggaran, koordinasi antarinstansi, serta tingkat kepatuhan pengguna jalan. Dari perspektif *Siyasah Tanfiziyah*, hasil penelitian menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan publik harus didukung oleh prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan agar tujuan perlindungan terhadap keselamatan masyarakat dan infrastruktur jalan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam merumuskan strategi penguatan pengawasan jembatan timbang yang lebih efektif, terintegrasi, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yaitu hanya berfokus pada implementasi pengawasan di UPPKB Jembatan Timbang Sungai Lansek sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada UPPKB di daerah lain yang memiliki karakteristik berbeda. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah informan yang terbatas sehingga temuan lebih menekankan pada pemahaman mendalam terhadap kondisi di lapangan. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih

banyak lokasi penelitian, informan dari berbagai instansi terkait, serta menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan pengawasan jembatan timbang.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada pengawasan Jembatan Timbang Sungai Lansek pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dan dimensi kendaraan, penimbangan, serta penindakan sesuai prosedur operasional. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya belum optimal karena masih ditemukan pengemudi yang menghindari jembatan timbang, sehingga tujuan pengawasan dalam mewujudkan keselamatan lalu lintas, menjaga infrastruktur jalan, dan menekan pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL) belum sepenuhnya tercapai. Hambatan utama implementasi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi, minimnya fasilitas pendukung, komunikasi dan koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta rendahnya kepatuhan pengemudi yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfiziyah*, implementasi pengawasan tersebut secara umum telah mencerminkan nilai-nilai keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*al-maslahah*), meskipun pelaksanaannya masih memerlukan penyempurnaan agar tujuan syariat dan tujuan hukum positif dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam, khususnya dalam penerapan konsep *Siyasah Tanfiziyah* terhadap implementasi kebijakan publik di bidang transportasi dan pengawasan lalu lintas. Penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kecukupan sumber daya, koordinasi antarinstansi, serta tingkat kepatuhan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah, Dinas Perhubungan, dan pihak terkait dalam meningkatkan efektivitas pengawasan jembatan timbang.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi pengawasan jembatan timbang pada wilayah yang lebih luas dengan melibatkan lebih banyak Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) sehingga diperoleh perbandingan

implementasi kebijakan di berbagai daerah. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) atau pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat efektivitas pengawasan, kepatuhan pengemudi, serta dampak kebijakan terhadap penurunan pelanggaran ODOL dan peningkatan keselamatan lalu lintas secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., & Muslimah, M. (2021). Memahami Teknik Pengolahan dan Analisis Data Kualitatif. *Proceedings of International Conference on Interdisciplinary Research*, 1(1), 173–186. <https://e-proceedings.iain-palangkaraya.ac.id/index.php/PICIS/article/view/605>
- Akmal, M. D., Maimun, & Karini, E. (2025). Implementasi Konsep Keadilan Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam Praktik Sistem Peradilan di Indonesia. *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(2), 964–970. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1111>
- Aprelia, R., Nurhayati, A., Santoso, R., & Zaharah. (2023). Implementation of religious services policy for the elderly in South Sumatera: Analysis of fiqh siyāsah tanfidziyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 3(2), 239–253. <https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v3i2.21222>
- Aqilah, S. Z. (2024). *Penanggulangan Tindak Pidana terhadap Kendaraan Angkutan Barang Melebihi Daya Angkut yang Menyebabkan Jalanan Menjadi Rusak: Studi di Wilayah Polres Metro* [Undergraduate thesis, Universitas Lampung]. <https://digilib.unila.ac.id/78441/>
- Ayunia, A. D., Nofrisel, & Adnyana, I. M. (2020). Sektor Transportasi pada Angkutan Barang dalam Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Transportasi & Logistik (JMTRANSLOG)*, 7(3), 192–202. <https://doi.org/10.54324/j.mtl.v7i3.413>
- Hanafiah, H., Palupi, R., Ghaniyyah, A. S., Nugraha, G. R., & Ilham, M. E. (2026). Assessing the impact of multilane free flow on vehicle operating costs and logistics efficiency in Indonesia using SWOT analysis approach. *Jurnal Manajemen Industri dan Logistik*, 10(1), 1–20. <https://doi.org/10.30988/jmil.v10i1.1613>
- Hasanli, Y., & Safarova, A. (2026). Assessment of the socio-economic damage from road traffic accidents based on an inter-sectoral damage redistribution matrix. *Future Transportation*, 6(1), Article 35. <https://doi.org/10.3390/futuretransp6010035>
- Heri, K. (2024). *Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Perhubungan dalam Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang: Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat* [Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung]. <https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/36138>
- Islammudin, M., & Mardijono, H. A. (2023). Implementasi Permenhub Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Angkutan Barang: Studi Kasus Wilayah Sidoarjo. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(1), 518–528. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.198>
- Iswantini, T., Faizal, L., & Fikri, A. (2025). Analisis Kritis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Tanggamus: Perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

- QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 4(2), 724–741. <https://doi.org/10.58738/qanun.v4i2.1096>
- Lesmini, L., Sholihah, S. A., Suryobuwono, A. A., & Abdurachman, E. (2025). Studi Literatur Kebijakan Transportasi Barang Multimodal di Indonesia. *Jurnal Siber Transportasi dan Logistik*, 3(3), 126–138. <https://doi.org/10.38035/jstl.v3i3.566>
- Muzaki, A., Luttadinata, Z., Putri, A. E., Kirana, M. G., Jannah, R. N., Firdaus, M. D., & Rifa'i, M. (2024). Politik Identitas dalam Pemilu di Indonesia: Tinjauan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah. *Prosiding Nasional Pascasarjana IAIN Kediri*, 7, 35–52. <https://jurnalpascasarjana.iainkediri.ac.id/index.php/prosiding/article/view/3562>
- Nawar, R. R., & Khalid. (2025). Implementasi Permenhub No. 47 Tahun 2023 tentang Alat Pengerangan Jalan dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(4), 806–817. <https://doi.org/10.56393/nomos.v5i4.3515>
- Pantar, M. C. C. (2025). *Pengawasan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sulawesi Selatan dalam Mengendalikan Overloading pada Kendaraan Angkutan Barang* [Undergraduate thesis, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/53318/>
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles, dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84. <https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93>
- Rahmawati, R., & Maruman, A. (2024). Studi Analisis Kinerja Jalan Raya akibat Beban Lalu Lintas dan Faktor Lingkungan. *Jurnal Teknik Sipil*, 15(2), 90–99. <https://doi.org/10.36448/jts.v15i2.4139>
- Ricana, A. G. (2024). *Analisis Kinerja Pegawai Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung dalam Mengatasi Kemacetan di Kota Bandar Lampung* [Undergraduate thesis, Universitas Lampung]. <https://digilib.unila.ac.id/80606/>
- Rozalia, D., Edi, R. N., & Rahmah, N. (2026). Kesenjangan Implementasi Pasal 16 UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jalan dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 6(2), 2384–2394. <https://doi.org/10.59240/kjsk.v6i2.815>
- Sulistiyawati, E., Kharamah, A., & Yamani, A. Z. (2025). Penerapan Nilai-Nilai Siyasah Syar'iyah dalam Kebijakan Publik Nasional. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 3(3), 959–968. <https://doi.org/10.62976/ierj.v3i3.1422>
- Yunus, A. R. (2021). *Makalah Ekonomi Regional: Peranan Transportasi*. Geografi.
- Zhang, Y., Zhao, J., Zhang, W., Dai, J., & Zhang, D. (2025). Evolution and structural analysis of China's road traffic regulatory system (1949–2023): Institutional change, policy tool diversification, and adaptive governance. *Transportation Safety and Environment*, 7(4), tda057. <https://doi.org/10.1093/tse/tdaf057>